



Temuan BPK Ada Perjalanan Dinas Fiktif

SANGGAU—Bupati Sanggau, Setiman H. Sudin berjanji akan segera mengambil tindakan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyebutkan terdapat sedikitnya sembilan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang melakukan perjalanan dinas fiktif atau tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.

Setiman tidak membantah hal tersebut dan dengan tegas mengatakan bahwa untuk mengambil tindakan selanjutnya, pihaknya masih akan menunggu rekomendasi dari BPK RI mengenai langkah yang akan diambil selanjutnya, apakah mekanisme pengembalian atau ada mekanisme lainnya.

Ia juga mengharapkan lembaga audit dapat melakukan audit atas kekayaannya menjelang berakhirnya masa jabatannya.

"Saya sudah tahu hal ini. Tindakan selanjutnya menunggu rekomendasi dari BPK RI apakah nanti dikembalikan atau ada mekanisme lain yang harus dilaksanakan. Saya juga akan cari tahu apa penyebabnya terhadap laporan tersebut. Menjelang akhir jabatan saya, saya juga akan minta audit terkait kekayaan saya," ujarnya, Kamis (22/8) kemarin.

Dalam dokumen rincian realisasi belanja dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2012 besaran biaya mencapai Rp1.801.608.900,00. Pemeriksaan BPK itu dilakukan secara uji petik atas bukti pertanggung

◆ Ke Halaman 27 kolom 5



Temuan BPK Ada Perjalanan Dinas Fiktif

Sambungan dari halaman 28

jawaban perjalanan dinas luar daerah berupa tiket pesawat pada Sekretariat DPRD (Setwan) Sekretariat Daerah (Setda) Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Distankanak), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM (Disperindagkop), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Kependidikan Daerah (BKD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Sanggau.

Bukti-bukti itu juga disandarkan BPK kepada antaralain berupa bukti Surat Tugas (ST), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Buku Kas Umum (BKU), kwitansi pembayaran perjalanan dinas, tiket pesawat dan *boarding pass*.

Dari hasil pengujian tiket pesawat ke dokumen manifest pesawat ditemukan adanya ketidaksesuaian data penerbangan yang tercantum pada tiket.

Masih dalam dokumen tersebut, keterangan dari masing-masing pegawai/pejabat terkait di lingkungan Setwan

(termasuk anggota dewan), Setda, Distankanak, Dinas ESDM, Disperindagkop, Dishubkominfo, Dinkes, BKD dan Bappeda pada tanggal 10-16 April 2013 diketahui terdapat 137 pegawai/pejabat yang tidak dapat menunjukkan bukti sah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.799.315.400,00. Sementara uji petik yang dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 16 April 2013 diketahui pula terdapat 3 pegawai yang menaikkan harga tiket saat melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp2.293.500,00. (sgg)